



KPK Soroti Pejabat DKI

Balai Kota, Warta Kota

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang memiliki harta kekayaan berlimpah.

Ia mengatakan, berdasar data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah.

"Saya nggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," tutur Alexander ketika memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022), yang dihadiri Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono bersama jajaran kepala dinas se-DKI Jakarta hingga Direktur Utama BUMD se-DKI Jakarta.

Alexander lantas mengungkapkan, terdapat banyak pejabat Pemprov DKI yang memiliki berpuluh-puluh bidang tanah. Ia berharap puluhan bidang tanah itu didapat dari uang yang halal.

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya

tanah berpuluh bidang, saya nggak tahu. Ini mudah-mudahan dari hasil yang halal. Dia punya usaha apa pun, saya nggak tahu, kan harapannya gitu," tutur Alexander.

Ia mempertanyakan mengapa ada pihak yang memiliki bidang tanah sebanyak itu. Menurut Alexander, tingginya harga tanah saat ini disebabkan para pihak yang menguasai berbidang-bidang tanah.

Dalam kesempatan itu, ia pun meminta pejabat Pemprov DKI yang hadir dalam acara tersebut agar tak menumpuk harta masing-masing.

"Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang buat apa. Ini yang buat harga tanah mahal sekali karena dikuasi kelompok tertentu, individu tertentu. Dan mohon maaf, kita harus men-set cara pikir kita, jangan menumpuk harta seolah-olah nggak ada habis," urai Alex, panggilan akrabnya.

Cari tambahan

Alex juga menyinggung tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta. Menurut dia, saking tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta, ada salah satu direktur jenderal (dirjen) di salah satu kementerian yang iri.

"Tolong di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, tingkat kesejahteraan, tingkat penghasilan jauh di atas rata-rata," ucapnya.

"Bahkan ada salah satu dirjen di kementerian, dia iri dengan penghasilan Kepala Dinas di Pemprov DKI," sambungnya. Alex lantas meminta para Kepala Dinas DKI Jakarta merasa bangga menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta yang bisa menyejahterakan. Di sisi lain,

ia meminta penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta yang tinggi ini berjalan seiringan dengan kinerja masing-masing.

Namun terlepas dari tingginya pendapatan ASN di DKI, Alexander menyebut ada pihak di Pemprov DKI yang masih mencari penghasilan tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Ia pun meminta Inspektorat DKI Jakarta mengawasi pihak-pihak yang mencari penghasilan tambahan ini.

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi, masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan, terutama dalam proses PBJ," ungkap Alexander. Baca juga: KPK Beri Skor 90 untuk Pemprov DKI terkait Pencegahan Korupsi Ia turut menyoroti pejabat di lingkungan Pemprov DKI yang memiliki harta kekayaan berlimpah.

Satgas Pengawas APBD

Lebih lanjut dipaparkan, KPK akan menempatkan lebih dari satu satuan tugas (satgas) di Pemprov DKI Jakarta. Satgas ini, kata Alex, akan bertugas mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

"Tahun depan, kami tidak hanya meletakkan satu Satgas di Pemprov DKI. Khusus untuk Pemprov DKI, (melainkan menempatkan) dua satgas mungkin terkait pengelolaan APBD (DKI 2023)," tegasnya.

Namun, Alex belum merinci berapa jumlah personel dalam satu satgas. Dia juga belum merinci tugas pasti dari satgas tersebut.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa Koordinasi Pencegahan Korupsi diadakan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang sejatinya

jatuh setiap 9 Desember 2022. Dengan demikian, melalui kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi itu, Alexander hendak mencegah tindak korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Rapat koordinasi ini menjadi acara tahunan untuk menjalin kerja sama, bersinergi, dalam rangka pemberantasan korupsi ya, terutama dalam rangka pencegahan," urainya.

Di lokasi yang sama, Heru Budi menyatakan ada beberapa hal yang harus dicegah secepat mungkin, mulai dari merencanakan alokasi anggaran hingga merealisasikan alokasi anggaran tersebut. Dengan demikian, menurut Heru, kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI bakal semakin maksimal.

"Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan (pencegahan) sedini mungkin. Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi anggaran, kami tidak kebetur-bentur. Sehingga, teman-teman dinas juga bisa yakin dalam bekerja," urainya.

Duta Antikorupsi

Dalam acara kemarin, Heru Budi yang mengenakan baju batik berwarna coklat duduk di kursi bersama pimpinan intansi lain se-Ibu Kota. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tampak mengenakan baju berwarna biru muda.

Pada pukul 09.00 WIB, Heru Budi bersama Alexander memakaikan selendang tanda Duta Antikorupsi dan Duta Penyuluhan Antikorupsi kepada empat pegawai Pemprov DKI Jakarta.

Selain Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, acara tersebut juga dihadiri oleh para kepala dinas se-DKI Jakarta dan Direktur Utama BUMD se-DKI Jakarta. ([kompas.com](https://www.kompas.com))